Pjs Bupati Bantu Korban Rumah Roboh

BANTUL (KR) - Pjs Bupati Bantul Adi Bayu Kristanto SH MHum, Minggu (3/11), menyerahkan bantuan kepada ahli waris Supimah (69) warga Rendeng Wetan RT 02 Pedukuhan Dagan, Timbulharjo Sewon Bantul, yang meninggal dunia karena musibah tertimpa rumahnya yang roboh karena amukan angin kencang pada Sabtu (2/11) sekitar pukul 18.50.

Bantuan dari Pjs Bupati Bantul berupa perlengkapan tidur, sembako, peralatan masak dan uang tali asih, diserahkan langsung oleh Adi Bayu Kristanto didampingi Kepala Dinas Sosial Bantul Gunawan Budi Santosa SSos MH dan Panewu Sewon Hartini SIP MM di rumah korban. Diterima Sumadi (71) selaku suami korban.

"Bantuan ini jangan dinilai isinya, tetapi hanya sebagai rasa keprihatinan kami karena musibah yang menimpa keluarga Supimah. Semoga bermanfaat," ungkap Adi Bayu.

Musibah yang mengakibatkan meninggalnya Supimah terjadi Sabtu (2/11) sekitar pukul 18.50. Saat itu Sumadi dan istrinya, Supimah, sedang berada di dalam rumah kampung kayu milik anaknya di Rendeng Wetan. Petang itu tiba-tiba terdengar suara gemuruh angin kencang yang menerjang rumah tersebut dan roboh menimpa Sumadi dan Supimah.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan pertolongan. Korban meninggal di lokasi kejadian sedangkan Sumadi dilarikan ke RSU PKU Muhammadiyah untuk mendapatkan perawatan.

Mereka yang terlibat dalam penanganan bencana tersebut, petugas dari BPBD Bantul, Polsek dan Koramil Sewon, Inafis Polres Bantul, Tagana, PSC, PMI Bantul dan relawan lokal dari warga setempat. Kerugian dalam kejadian tersebut sekitar Rp 22 juta. **(Jdm)-d**

KR-Judiman

Pjs Bupati Bantul menyerahkan bantuan kepada ahli waris korban.

AMANKAN PILKADA 2024

Polres Bantul Terjunkan 518 Personel

KR-Judiman

Jajaran Polres Bantul persiapan diri untuk mengamankan Pilkada 2024.

BANTUL (KR) - Jajaran Polres Bantul menggelar pengamanan terpadu tahap kampanye Pilkada Bantul dalam Operasi Mantap Praja Progo 2024. Sebanyak 518 personel Polres Bantul diterjunkan untuk mengawal keamanan kampanye pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, Minggu (3/11).

"Ada 518 personel yang diterjunkan untuk mengamankan kampanye terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan nomor urut 03, Joko B Purnomo-Rony Wijaya Indra Gunawan di Lapangan Pasar Kuliner Karangtalun Imogiri," jelas Kasi Humas Polres Bantul AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana.

Selain melakukan pengawalan jalannya kampanye, polisi juga akan memberlakukan penyesuaian rekayasa lalu lintas secara situasional. Rekayasa lalin diterapkan berdasarkan eskalasi yang terjadi di lapangan.

Jeffry mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama tahap kampanye berlangsung. "Kami menyarankan masyarakat pengguna jalan untuk mencari rute alternatif dan menghindari kawasan kampanye guna mengurangi kepadatan lalu lintas. Ini adalah upaya kita bersama untuk memastikan kelancaran aktivitas sehari-hari warga," ujarnya.

Lebih lanjut, Jeffry mengungkapkan, Operasi Mantap Praja Progo 2024 dilakukan stakeholder terkait. Pengamanan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif.

Sementara berdasarkan kesepakatan antarpaslon Pilkada, jadwal rapat umum Pilkada Bantul akan berlangsung pada November 2024. Untuk Paslon nomor urut 1, Untoro Hariadi-Wahyudi Anggoro akan menggelar rapat umum pada Minggu (17/11).

Kemudian, untuk Paslon nomor urut 2, Abdul Halim Muslih-Aris Suharyanta, akan menggelar rapat umum pada Minggu (10/11). Sedangkan, paslon nomor urut 3, Joko B Purnomo-Rony Wijaya Indra Gunawan, menggelar rapat umum pada Minggu (3/11). **(Jdm)-d**

FPUN Soroti Penerimaan PPPK

BANTUL (KR) - Fraksi Persatuan Ummat Nasional (FPUN) DPRD Kabupaten Bantul, gabungan dari Partai Demokrat, PPP, Partai Ummat dan PAN, menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna.

Sejumlah persoalan menjadi perhatian FPUN, di antaranya PPPK guru berimbas kepada sekolah swasta, peredaran miras serta netralitas ASN dan pamong dalam Pilkada Bantul.

Juru Bicara FPUN Herry Fahamsyah, Senin (4/11), mengatakan fraksi menyoroti sejumlah persoalan di antaranya masalah penerimaan PPPK guru, peredaran miras hingga terkait netralitas ASN dan pamong kalurahan dalam Pilkada, pendidikan berbasis karakter budaya dan berahlak mulia untuk pelajar di Bantul dan kelima insentif untuk RT di Kabupaten Bantul.

"Saat ini penerimaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sangat merugikan sekolah swasta. Kami FPUN pada dasarnya sangat setuju dan mendukung dengan perbaikan keserjahteraan guru honorer. Kami berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan guru akan berbanding lurus dengan peningkatan mutu pembelajaran. Namun demikian kami tidak sependapat dengan pelaksanaan kebijakan guru PPPK yang sangat merugikan sekolah swasta. Dengan kebijakan guru PPPK ini sekolah swasta kehilangan guru-guru terbaiknya yang mengundurkan diri karena masuk sebagai guru PPPK," ujarnya.

Terkait sistem pendidikan, seperti kurikulum, sistem zonasi, pembebanan administrasi guru yang memberatkan, sistem ujian dan penghilangan nilai Ebtanas Murni. FPUN berharap agar aspirasi tersebut dapat direspons positif pemerintah sehingga sistem pendidikan kita ke depan menjadi lebih baik lagi.

Terhadap kondisi sarana pendidikan, terutama infrastruktur gedung sekolah negeri maupun swasta. FPUN meminta dinas terkait dapat lebih memiliki perhatian dan kepedulian. Untuk infrastruktur jalan yang sudah rusak bertahun-tahun di wilayah Kabupaten Bantul, fraksi meminta untuk segera di lakukan perbaikan dengan tetap memperhatikan skala prioritas apabila terjadi keterbatasan anggaran.

Terkait dengan netralitas ASN dan Pamong Kalurahan dalam kontestasi Pemilukada Kabupaten Bantul saat ini FPUN mengingatkan dan meminta kepada penyelenggara pemilu terutama Bawaslu untuk lebih tegas dalam menegakkan aturan. "Ini penting kami sampaikan jangan sampai aturan ini hanya sebatas aturan yang dapat dilanggar seenaknya," tegasnya.

Berkaitan dengan tugas ketua RT FPUN mengusulkan pemberian insentif kepada ketua RT di Kabupaten Bantul. Terkait darurat sampah fraksi tersebut mengusulkan agar segera ada langkah-langkah konkrit untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya mengusulkan pendirian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di setiap Kapanewon.

Terkait dengan DIY darurat miras, FPUN mempertanyakan bupati tentang regulasi terhadap mulai munculnya tempat penjualan minuman keras di beberapa titik di Kabupaten Bantul. **(Roy)-d**

Pengawas Pilkada Dibekali Siwaslih

KR-Judiman

Pembekalan Pengawas Pilkada Dengan Sistem Pengawasan Pemilihan.

BANTUL (KR) - Bawaslu Bantul membekali jajaran pengawas pemilihan kecamatan, desa dan TPS dengan aplikasi pengawasan online Siwaslih (Aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan). Aplikasi ini diterapkan secara nasional oleh Bawaslu RI pada pemilihan serentak Tahun 2024 sebagai upaya mempercepat informasi hasil pengawasan secara berjenjang sampai dengan tingkat pusat.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Bantul Dewi Nurhasanah, Minggu (3/11), memaparkan Siwaslih nantinya akan dijalankan oleh pengawas kecamatan, pengawas desa dan pengawas TPS. Untuk pengawas TPS pelaporan melalui Siwaslih dimulai sejak masa tenang 24 November 2024 dan berakhir sampai tahapan penghitungan suara.

Pengawas TPS pada masa tenang akan berkeliling di sekitar TPS untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye dimasa tenang, selain itu juga memastikan tidak ada praktik pemberian barang atau uang kepada pemilih serta memastikan tidak ada potensi gangguan terhadap pelaksanaan pemungutan suara.

Berdasarkan pengawasan di masa tenang tersebut nantinya pengawas TPS akan melaporkan secara online hasil pengawasannya melalui Siwaslih dan secara berjenjang dapat langsung diketahui oleh pengawas di atasnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, menjelaskan pembekalan terhadap penggunaan Siwaslih ini akan dilakukan secara marathon ke semua pengawas TPS yang berjumlah 1.487 orang. Masing-masing PTPS akan melakukan pembuatan akun Siwaslih secara serentak pada tanggal 05 November 2024.

Selanjutnya Pengawas TPS melakukan proses penguatan dan simulasi mengisi dan melaporkan hasil pengawasan melalui Siwaslih. Didik menambahkan bahwa pengawas TPS ini dituntut untuk paham tentang tata cara prosedur pemungutan penghitungan suara, selain itu juga paham terhadap fokus pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta menguasai pelaporan hasil pengawasan baik itu yang berbentuk laporan hasil pengawasan maupun dalam bentuk laporan secara online. **(Jdm)-d**